

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 54 /SEOJK.05/2017



PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

Jalan Raya Pendeglang KM.04 No.99
Lingk.Karundang, Tembong, Cipocok Jaya
Kota Serang—Banten 42126
Telp.0254-8487354 Fax.0254-8487356

Info@jamkridabanten.co.id Website : www.jamkridabanten.co.id

1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan	Kewarga negaraan	Domisili
1.	Hendra Indra Rachman	Direktur Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2929/NB.1/2014	24-09-2014 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
2.	Ahmad Rohendi	Direktur	03-11-2014/ Nomor : KEP-2930/NB.1/2014	24-09-2014 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Pandeglang
3.	Didin Rasyiddin Wahyu	Komisaris Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2926/NB.1/2014	24-09-2014 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
4.	Bambang Dwi Suseno	Komisaris	03-11-2014/ Nomor : KEP-2927/NB.1/2014	24-09-2014 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
5.	T. Jaka Rooseno	Komisaris	07-02-2017/ Nomor : KEP-27/NB.11/2017	28-02-2017 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
6.	Fajri Ali	D P S	21-12-2015/ Nomor : KEP-39/NB.22/2015	01-02-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Cilegon
7.	Zaenal Abidin	D P S	09-02-2016/ Nomor : KEP-14/NB.22/2016	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang

Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar Profesi :

a. Direktur Utama

Data Pribadi

1.	Nama	Hendra Indra Rachman
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Garut / 17.11.1970
4.	Kewarganegaraan	Indonesia
5.	Alamat Rumah	Jl. Rancawangi No.7 A Bandung . 40275
6.	Alamat Kantor	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	3273121711700006
8.	NPWP	09.377.944.5-424.000
9.	Telp. Kantor/Selular	0254- 8487354 / 08122132195
10.	<i>Email</i>	hendraindrachman@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	03.06.1983	Sekolah Dasar Negeri Leuwidaun, Garut	
2.	06.05.1986	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Garut	
3.	13.05.1989	Sekolah Menengah Atas Negeri 5, Surabaya	
4.	16.02.1994	Universitas Airlangga, Surabaya.	Strata 1 Fakultas Hukum, Hukum Perdata
5.	01.01.2005	Universitas Padjadjaran, Bandung	Strata 2, Fakultas Ekonomi, Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran.

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Perusahaan Penjaminan
2.	2014	LSPMR	Konferensi Nasional Manajemen Risiko II
3.	2015	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
4.	2015	Kemenkeu RI, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko bekerja sama dengan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Seminar Surat Berharga Syariah Negara
5	2015	Best One Asia Reinsurance Brokers	Pelatihan Pengetahuan Produk Surety Bond dan Bank Garansi

6	2015	OJK	Workshop Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan
7	2015	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
8	2015	Internal Training	Pelatihan : 1. Manajemen Risiko 2. Manajemen Strategi
9	2016	Kantor Jasa Akuntansi Muchlish & Wiyantoro	Inhouse Training Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
10	12 Mei 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko

Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	01.07.2014 Direktur Utama Perusahaan Penjaminan Daerah Banten	Bertugas mengelola Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki misi mengembangkan bisnis UMKM, khususnya sebagai jembatan UMKM agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan.

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	

b. Direktur

Data Pribadi

1.	Nama	Ahmad Rohendi
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Pandeglang, 6 April 1969
4.	Kewarganegaraan	Indonesia
5.	Alamat Rumah	Kompleks Bougenvile Blok C-16 Jl. Karang Tanjung Kadu Merak Kec. Karangtanjung , Pandeglang Banten
6.	Alamat Kantor	Jl. Raya Pandeglang Km 4 Karundang No 99 Kota Serang – banten
7.	Nomor KTP/Paspor	3601250107690001
8.	NPWP	25.282.859.5-419.000
9.	Telp. Kantor/Selular	08111222136
10.	Email	ahmad.rohendi@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1	1976-1982	SD Negeri 5 Pandeglang	
2	1982-1985	SMPN 1 Pandeglang	
3	1985-1988	SMA N 1 Pandeglang	Fisika 1
4	1988-1994	Universitas Indonesia, Fakultas Teknik	Teknik Metalurgi
5	2015- 2016	Universitas Sultan Ageng Tritayasa – Pasca Sarjana	Magister Akuntansi

Riwayat Pekerjaan

No	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1	2014 – Sekarang	PT. Jamkrida Banten	Masih Bekerja
2	2012 – 2014	PT. Banten Sarana Gas Industri	Mengundurkan diri
3	2008 – 2012	PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang	Kontrak Selesai

Uraian Keterampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	MS-Office	Baik	
2	Bahasa Inggris	Aktif	
3	Bahasa Jepang	Pasif	

Uraian Pelatihan yang pernah diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Usaha Perusahaan Penjaminan sebagai peserta. Dilaksanakan di Bali
2	2015	BoAre	Peserta Pelatihan Penjaminan Syariah
3	2015	PT. Jamkrida Banten	Narasumber Inhouse Training, - Teknik Penyusunan Laporan - Teknik Penyusunan Proposal Kegiatan Code of Conduct
4	2016	OJK – LKNB Syariah	Sertifikasi Tingkat dasar Dewan Pengawas Syariah
5	2016	OJK	Seminar International – Lembaga Keuangan Syariah
6	2016	Badan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Prov Banten	Narasumber “ Program penjaminan untuk Peserta Pelatihan kewirausahaan”
7	2016	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov Banten	Narasumber “Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi untuk pelaku Pariwisata”
8	2016	ISEI	Peserta Pelatihan “Metode Value in Risk”
9	25-28 September 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko
10	2017	Inhouse	Pelatihan Front Linner ; Public Speaking, Public relation, Customer Satisfaction

11	2017	Bank Mandiri	Pelatihan Investasi Pasar Modal
----	------	--------------	---------------------------------

Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

a. Komisaris Utama :

Data Pribadi

1.	Nama	: Didin Rasyidin Wahyu
2.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	: Sumedang, 28 Oktober 1964
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Jalan Bhayangkara Kp. Dukuh Jaya RT. 03/08 No. 139 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota – Serang
6.	Alamat Kantor	: Jalan Raya Pandeglang KM 4 No. 99 Karundang – Serang
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3604012810640157
8.	NPWP	: 09.249.718.9-407.000
9.	Rekomendasi DSN MUI, bagi DPS	: No. --
10.	Telp. Kantor/Selular	: 087877550444
11.	Email	: Didinrw_28@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	Desember 1975	SD Negeri 1 Pandeglang	--
2	Juni 1979	SMP Negeri 1 Pandeglang	--
3	Juni 1982	SMEA Negeri Pandeglang	Sekretariat/Tata Usaha
4	Maret 2000	STIA Maulana Yusuf Banten	Administrasi Negara
5	Januari 2000	Universitas Tirtayasa Banten	Ekonomi Manajemen
6	Oktober 2003	STIMA IMMI Jakarta	Magister Manajemen

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No.	Tahun	Nama Penyelenggara	Tofik dan Uraian Singkat
1	2012	IAIN SMH Banten	Pemateri Seminar : Evaluasi Praktek Perbankan Syariah di Indonesia
2	2014	FoSSYEI Regional Banten	Pemateri Sharia Economic Training
3	2014	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Peserta Edukasi dan Diskusi tentang "Produk dan Jasa Keuangan"
4	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Internasional "Sharia Economics Fatwas Around Countries"
5	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Nasional "Modernisasi Filantropi Muslim Indonesia"

6	2014	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Peserta Seminar Internasional "Moderasi Islam : Upaya Untuk Menangkal Radikalisme Agama"
7	2014	Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Peserta acara sosialisasi "Surat Berharga Syariah Negara"
8	2014	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Peserta Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko II/Bali
9	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Certified In Risk Governance Profesional (CRGP)
10	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko III/Batam
11	2015	PT. Jamkrida Banten	Menyusun Perencanaan dan Menyusun Laporan
12	2015	PT. Jamkrida Banten	Sebagai Narasumber program pelatihan Manajemen Risiko dan Manajemen Strategi
13	2015	PT Jamkrida Banten	Jadilah Insan Kreatif dan Perubahan & Pribadi Kreatif
14	12 Mei 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko (LSPMR)	Sertifikasi Manajemen Resiko

Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1	Tahun 2010 sd 2012 Bank BJB Syariah Cilegon Branch Manager	-Memimpin seluruh staf/pegawai yang ditugaskan di Cabang Cilegon - Melaksanakan pertanggung jawaban yang diberikan oleh Kantor Pusat atas seluruh kegiatan perbankan di wilayah kerja Kota Cilegon dan sekitarnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan asset.
2	Tahun 2012	Pensiun dari Bank BJB Syariah
3	Tahun 2012 sd sekarang IAIN SMH Banten	- Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester ganjil mata kuliah Manajemen Risiko dan Praktikum Perbankan Syariah - Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester genap mata kuliah Ekonomi Manajerial dan Teori Ekonomi Makro
4	Tahun 2012 sd sekarang STIE Bina bangsa Banten Dosen Luar Biasa	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Manajemen Pemasaran, Pengantar Bisnis, Pengantar Ekonomi Mikro/Makro
5	Tahun 2014 sd sekarang STIE Bina bangsa Banten Dosen Tetap (NIDN 0428106406)	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Akuntansi Keuangan Lanjutan I, Akuntansi Keuangan Lanjutan II, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kewirausahaan dan Manajemen Keuangan Sektor Publik.
6	Tahun 2014 sd sekarang PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten (BUMD Propinsi Banten)	Komisaris Utama Melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan arahan kepada Direksi dan memberikan laporan setiap bulan kepada Pemegang Saham (Pemprov. Banten)

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Perbankan	Baik	Masa Kerja 28,6 tahun
2	Penjaminan Kredit	Baik	--
3	Bahasa Inggris	Cukup	--

Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Sektor Jasa Keuangan

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1	Penghargaan Pekerjaan	02-01-1999	Masa Kerja 15 Tahun pada Bank Jabar
2	Penghargaan Pekerjaan	26-03-2008	Masa Kerja 25 Tahun pada Bank Jabar Banten

b. Komisararis**BIODATA****A Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Bambang Dwi Suseno, CRGP
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala (Associate Professor)
4	NIP/NIK/No. identitas lainnya	0403266800016
5	NIDN	0403066401
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 3 Juni 1964
7	Email	senadwi_bam@yahoo.co.id
8	Nomor telepon /HP	081380554478 dan 087772638803
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Pandeglang KM 4 No.89 dan Jl. Letnan Jidun No. 7C Kepandean Kota Serang
10	Nomor telepon/fax	02548487358
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 56 orang S2=- orang S3=- orang
12	Mata kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Strategik 2. Manajemen Sumber Daya Manusia 3. Studi Kelayakan Bisnis 4. Ekonomi Manajerial 5. Kapita Selekta SDM 6. Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank 7. Sistem Informasi Manajemen

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Kertanegara Jakarta	STIE IPWIJA Jakarta	Universitas Diponegoro Semarang
Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen	Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	1990-1994	1994-1996	Agust 2012-Mar 2017
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Pengaruh Bauran Pemasaran dan Salesforce terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Tabungan Negara Cabang Jakarta Harmoni	Strategi Outsourcing, Partnership dan Land Bank Terhadap Kinerja Kawasan Industri di KabupatenTangerang	Kapabilitas Tata Kelola Lunak dala Perusahaan Keluarga Studi Empirik pada Industri Transportasi Bus di DKI Jakarta
Nama Pembimbing/Promotor	MA Abu Hayat, Drs, ME dan Bahris Paseng, M.Sc	Prof. J. Supranto dan Bambang Tri Cahyono, Ph.D	Prof. Augusty Ferdinand, DBA; Prof. Christantius Dwiatmaja, Ph.D; Dr. Ahyar Yuniawan

C. Pelatihan Profesional

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
2017	Instrumen Investasi Konvensional dan Syariah	Treasury Bank Mandiri	1 hari
2017	Sertifikasi Kompetensi Risk Governance Professional (CRGP) di Batam dan Singapore	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	4 hari

2017	People Analytic: Transformation HR into Business	Better Mind Consulting Group	1 hari
2017	Pelatihan Sispena bagi Asesor SMK	Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah	3 hari
2016	Revitalizing Islamic Finance in the New Normal Era (OJK International on Islamic Forum)	Otoritas Jasa Keuangan	1 hari
2016	Permodelan Manajemen Risiko	ISEI Pusat	2 hari
2015	Teknik Penjaminan Syariah	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	1 hari
2014	Certified Hypnotherapy gelar 3professional C.Ht	Indonesia Board of Hypnotherapy	2 hari
2014	Pelatihan Asesor SMA/MA	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M)	5 hari
2012	Pemberdayaan Kelembagaan Peningkatan Tata Kelola dan Resolusi Konflik Penyelenggara-Pengelola Perguruan Tinggi	Ditbaga dan Kerjasama Ditjen Dikti	3 hari
2012	Aplikasi Ekonometri untuk Penelitian Ekonomi dan Keuangan	SAWALA Univ Diponegoro	1 hari
2011	TOT Pendidikan Anti korupsi	Ditjen Dikti- KPK	3 hari

D. Pengalaman Praktis Manajerial dan Akademik

Tahun	Perusahaan/Lembaga
Sept 2012- November 2013	Staf Pengajar dan Kepala LPPM Politeknik Piksi Input Serang
Jan 2014-	Direktur Penelitian dan Publikasi STIE Banten
Okt 2014-	Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (BUMD Provinsi Banten)-
2012- sekarang	Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten
2013 Sekarang	Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Serang Raya
Juli 2017-	Staf Pengajar pada Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Juli 2017-	Staf Pengajar pada Magister Ekonomi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

E. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2017	Pemetaan SMK Sebagai Balai Latihan Kerja di Provinsi Banten	Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Banten	46
2	2017	Kajian Keandalan Respon Sistem Pengaduan Pelayanan Perijinan Satu Pintu di Provinsi Banten	Dinas Pengembangan Investasi dan Pelayanan Satu Pintu	45
3	2016	Ketahanan Organisasi Keluarga: Bukti Empirik di Provinsi Banten	STIE Banten	7
4	2016	Kajian Kelayakan Pendirian PD Pasar Distribusi Banten	Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Banten	43
5	2016	Kajian Pendirian Dana Bergulir Provinsi Banten	Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Banten	46
6	2015	Technology Transfer Motive Of Manager In Eastern Asia: Empirical Results From Manufacture Industry In Banten Province, Indonesia	STIE Banten	10
7	2015	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Agro Provinsi Banten 2016-2020	Kementerian Perindustrian RI dan Dinas Indag Provinsi Banten	55
8	2015	Studi Pola Distribusi Barang Strategis di Provinsi Banten	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Indag Provinsi Banten	35
9	2014	Probe Effect Level of Education, Knowledge Management, Motivation and Capabilities on Managerial Performance at the Logistic Industry in Banten Province, Indonesia	Mandiri	6
10	2013	Tim Peneliti Proyeksi DOB di Provinsi Banten 2014-2025	Badan Litbang Provinsi Banten	43
11	2012	Studi Daya Saing Pariwisata di Provinisi Banten	Dinas Kebudayaan	47

			dan Pariwisata Provinsi Banten	
12	2012	Studi Karakteristik Produk dan Sentra One Village One Product (OVOP) di Provinsi Banten	Kementrian Perindustrian dan Disperindag Provinsi Banten	42

F. Pengalaman Pengabdian Masyarakat

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)
1	2017	Tim Ahli Pokja Penyusunan Raperda Rencana Pengembangan Industri Provinsi Banten 2017-2037	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	Rp 7.500.000
2	2017	Pendampingan kelompok Peternak kambing Kp. Sukawana Kel Sumur Pecung Kec. Cipocok Kota Serang	Pribadi	Rp 8.000.000
2	2017	Refreshment Asesor SMK BAP S/M Provinsi Banten	Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah	Rp 350.000
3	2016	Tenaga ahli dala FGD Kajian Perwilayahan Industri di Provinsi Banten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	Rp 2.500.000
4	2015	Ketua tenaga ahli Penyusunan Roadmap Industri Agro Provinsi Banten 2015-2035	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	Rp 8.000.000
5	2014	Koordinator Pendirian dan Perijinan PT. Penjaminan Kredit Daerah	Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Banten	Rp 3.000.000
6	2014	Sekretaris ISEI Cabang Serang Koordinator Banten Periode 2014-2018	ISEI Pusat	-
6	2013	Asesor Akreditasi SMK	Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah	Rp 750.000
7	2012	Yuri Lomba Upakarti bagi UMKM se Provinsi Banten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	Rp 2.500.000

G. Publikasi Artikel Ilmiah Pada Jurnal dala 5 tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume Nomor Tahun
	Governance In Family Business: Empirical Study In Bus Transportation Industry (Penulis I)	Corporate Ownership & Control. Terindeks Scopus Q3	Volume 15, Issue 1, Fall 2017 Continued - 2
1	Technology Transfer Motive Of Manager In Eastern Asia: Empirical Results From Manufacture Industry In Banten Province, Indonesia (Penulis I)	Problem and Prespective in Management. Terindeks Scopus Q3	Volume 14, Issue 2, 2016
2	Probe Effect Level of Education, Knowledge Management, Motivation and Capabilities on Managerial Performance at the Logistic Industry in Banten Province, Indonesia	VSRD International Journal of Business and Management Research	Vol. V Issue VIII September 2015
3	Analisis Dampak Kredit dan Penguatan Modal Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah Terhadap Perekonomian di Provinsi Banten (Penulis I)	Scientium Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah Provinsi Banten ISSN 2355-5246	Volume 3 No 1 Tahun 2014

H. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Proceeding: The 2nd International Conference on Business Management (ICBM 2016) Vol (1) Issue (2) 978-967 - 13903 -6 -8 (Corresponding author/presenter) Conducted by: (1) School of Business Management Universiti Utara Malaysia, (2) Center for Sustainability Research and Consultancy (CSRC) Pakistan (3) Faculty of Business and Economics Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Family Organisational Strength : Empirical Evidence In Banten Province, Indonesia	Hotel Millennium Jakarta, Indonesia, 19-21 August, 2016
2	ICG2014 – International Conference on Governance (ICG-2014) Trisakti University	Probe Effect Level of Education, Knowledge Management, Motivation and Capabilities on Managerial	Hotel Sari Pasific Jakarta 13th-15th February, 2014

		Performance at the Logistic Industry in Banten Province, Indonesia	
3	International Conference on Customer Service System and Management 2013 (ICSSM 2013) University of Technology MARA, Malaysia	Strength Wazir Capital For Growth Drivers In a Family Owned Company Natives: evidence from Indonesia	Kuala Lumpur April 3 rd , 2013

I. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

J. Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor PID
1	(Disertasi) Kapabilitas Tata Kelola Lunak Dalam Perusahaan Keluarga.	2017	Karya Tulis (Disertasi)	03198

c. Komisaris

BIODATA

1	Nama	: Drs. Takro Jaka Rooseno
2	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3	Tempat/Tanggal Lahir	: Karawang, 30 September 1956
4	Kewarganegaraan	: Indonesia
5	Alamat Rumah	: Jl. Bhayangkara Komplek Pemda Blok C No : 16 Kel. Cipocok, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten
6	Alamat Kantor	: -
7	No KTP/Paspor	: 3604023009560219
8	NPWP	: 05.805.493.3-40.000
9	Rekomendasi DSN MUI, bagi DPS	-
10	Telp Kantor/ Selular	081379690239
11	Email	

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	1969	Sekolah Dasar Negeri	
2	1972	SMEP Negeri	
3	1975	SMEA Negeri	Tata Buku
4	1976	AKADEMI AKPI Bandung	Perbankan
5	1977	UNIVERSITAS FE UNPAS	Ekonomi Umum
6	1990	STIA Maulana Yusuf Banten	Administrasi Negara

I. Riwayat Pekerjaan **)

No	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1	Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain Dipenda Jabar	Melaksanakan Tugas dibidang Pajak
2	Kepala Sub Bidang Pendapatan BAWASDA Prov. Banten	Melakukan pengawasan bidang pendapatan daerah
3	Kepala Sub Bidang Pengawasan Pajak Daerah BAWASDA Prov. Banten	Melakukan pengawasan bidang pajak daerah
4	Kepala Bidang Pengawasan Keuangan pada BAWASDA Prov. Banten	Melakukan pengawasan bidang keuangan daerah
5	Kepala Sub Dinas Bindal pada Dipenda Prov. Banten	Melakukan pembinaan dan pengendalian pendapatan daerah
6	Kepala Bidang Bindal pada DPKAD Prov. Banten	Melakukan pembinaan dan pengendalian pendapatan daerah
7	Kepala Biro Kesra Setda Prov. Banten	Membantu Gubernur di Bidang Kesejahteraan
8	Inspektur Provinsi Banten	Membantu Gubernur di Bidang Pengawasan
9	Asiten Tata Praja Sekretariat Daerah	Membantu Sekretaris Daerah di Bidang Pemerintahan
10	Inspektur Provinsi Banten	Membantu Gubernur di Bidang Pengawasan
11	Pensiun dari PEMPROV	

Biodata singkat DPS, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

a. Dewan Pengawas Syariah

Data Pribadi

Nama : Drs. Fajri Ali, MM
Orang tua : H Ali Yumi
Tempat/tgl lahir : Serang, 10 September 1967
Alamat : Link Pagebangan Rt. 11/03 No. 105 A Ketileng Kota Cilegon
Banten, HP 08 777 1538 221

Pendidikan

1. Ponpes Daar El-Qolam, Gintung, Balaraja, Tangerang lulus MA th 1988
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati di Serang, lulus S 1 th 1994
3. Magister Manajemen Universitas Budi Luhur Jakarta, lulus S 2 th 2003

Organisasi :

1. Senat Mahasiswa Fak. Syari'ah IAIN SGD di Serang 1991 – 1992
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang 1990 – 1992
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon Pengurus 2015-2020.
4. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Prop Banten 2012 – 2017
5. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Cilegon 2010-2015.

Pengalaman Mengajar:

1. STIE & STIKOM Al-Khairiyah, Cilegon, Dosen , 2005 s.d. sekarang
2. IAIN SHM Banten di Serang, Dosen LB, 2005 s.d. sekarang

Pengalaman Bekerja :

1. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri Pemkot Cilegon, Dewan Pengawas Syari'ah, 2007 s.d. 2015.
2. PT. Jamkrida Banten , Dewan Pengawas Syari'ah tahun 2016 s.d sekarang.

Training / Seminar :

1. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Penjaminan Syariah oleh OJK n DSN di Jakarta 09 – 11 Agustus tahun 2016.
2. Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN -MUI Oleh Dewan Syariah Nasional
3. Workshop Itjima Sanavi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Penjaminan Syariah Oleh DSN-MUI

b. Dewan Pengawas Syariah

Data Pribadi

1.	Nama	:	Zaenal Abidin Syuja'i, Lc.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 17 Agustus 1955
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jl KM. Idris Kubang, No. 11 RT 02/12 Cipare Kota Serang
6.	Alamat Kantor	:	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten KP3B Jln. Syech Nawawi curug Serang – Banten
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3604011708550129

8.	NPWP	:	45.391.562.1-419.000
9.	Rekomendasi DSN MUI, bagi DPS	:	No.U-343/DSN-MUI/XI/2015
10.	Telp. Kantor/Selular	:	0877 7173 0049 / 0811 1225 500
11.	Email	:	zaenalabidin54@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1.	Tahun 1974- 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sastra Arab
2.	Tahun 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
3.	Tahun 1977-1981	Imam Muhammad Islamic University Riyadh Saudi Arabia	Sarjana strata satu Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir
4.	Tahun 2010	Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang	S2 Program Study Kebijakan Publik (belum selesai)

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1	04 Oktober 2017	DSN – MUI	Workshop Itjima Sanavi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Penjaminan Syariah

Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	PT. Jamkrida Banten	Sebagai Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah tahun 2016 sampai sekarang

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Arab	Aktif	-
2.	Bahasa Inggris	Pasif	-

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal	
			Pengangkatan oleh RUPS	Pemberhentian oleh RUPS
1	Lama : Didin Rasyidin Wahyu	Komisaris Utama	Akte Nomor : 10 tanggal 24 September 2014	Akter Nomor : 174 tanggal 31 Agustus 2016
	Bambang Dwi Suseno	Komisaris	Akte Nomor : 10 tanggal 24 September 2014	
	H. Asmudji Hermani Wahyudi	Komisaris	Akte Nomor : 292 tanggal 26 Februari 2016	
2	Baru : Didin Rasyidin Wahyu		Akte Nomor : 10 tanggal 24 September 2014	
	Bambang Dwi Suseno		Akte Nomor : 10 tanggal 24 September 2014	
	T. Jaka Rooseno		Akte Nomor : 163 Tanggal 28 Februari 2017	

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

A. Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan UUPT dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan Para Pemangku Kepentingan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

B. Pertanggungjawaban Direksi

- a. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan

Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- b. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan dari RUPS dan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan dari RUPS. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan;
- c. Laporan Keuangan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memungkinkan Pemegang Saham melakukan penilaian.

A. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dimaksud, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan.

C. Tugas, wewenang dan pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan
3. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

c. DPS

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

3. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Hendra Indra Rachman	Sertifikasi Managemen Resiko	8 Juni 2017	LSPMR – Jakarta
		Pelatihan Public Speaking, Public Relation, dan Service Exellent	12-13 Agustus 2017	BP Consult – Serang
2	Ahmad Rohendi	Pelatihan Investasi Pasar Modal	30 Maret 2017	PT Bank Mandiri
		Sertifikasi Managemen Resiko	26-27 September 2017	LSPMR - Batam
		Pelatihan Public Speaking, Public Relation, dan Service Exellent	12-13 Agustus 2017	BP Consult – Serang

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Didin Rasyidin Wahyu	Sertifikasi Managemen Resiko	8 Juni 2017	LPSMR – Jakarta
2	Bambang Dwi Suseno	Pelatihan Investasi Pasar Modal	30 Maret 2017	PT Bank Mandiri – Jakarta
		Sertifikasi Managemen Resiko	26-27 September 2017	LSPMR – Batam
3	T. Jaka Rooseno	-	-	-

c. DPS

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Fazri Ali	Sosialisasi Fatwa terbaru DSN-MUI	21 Maret 2017	Dewan Syariah Nasional - Jakarta
		Workshop Ijtima Sanavi untuk peningkatan Kompetensi DPS Syariah Penjaminan	04 Oktober 2017	Dewan Syariah Nasional - Jakarta
2	Zaenal Abidin Sujai	Sosialisasi Fatwa terbaru DSN-MUI	21 Maret 2017	Dewan Syariah Nasional - Jakarta
		Workshop Ijtima Sanavi untuk peningkatan Kompetensi DPS Syariah Penjaminan	04 Oktober 2017	Dewan Syariah Nasional – Jakarta

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

-Uraian singkat-

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

-Uraian singkat-

6. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-

a. Rapat Direksi

Di perusahaan kami rapat Direksi dilaksanakan setiap seminggu sekali diawal pekan yaitu rapat yang bergaendakan evaluasi dan perencanaan mingguan dari setiap divisi yang dihadiri oleh seluruh karyawan. Dalam satu tahun kurang lebih rapat diadakan sebanyak 42 kali pertemuan rapat. Selain rapat direksi dengan seluruh karyawan, rapat Direksi dengan pengurus perusahaan lainnya juga diadakan setiap ada masalah yang memang harus dibahas. Ditahun 2017 rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah frekuensi rapat diadakan secara keseluruhan sebanyak kurang lebih 12 kali Rapat dalam setahun.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Hendra Indra Rachman	V	-	100 %
2.	Ahmad Rohendi	V	-	100 %
Dst.				

b. Rapat Dewan Komisaris

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-

Rapat internal Dewan Komisaris dalam setahun dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, selain itu Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan pengurus perusahaan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tujuan membahas masalah-masalah perusahaan yang dianggap penting untuk dibahas. Rapat Komisaris dengan Direksi dan DPS dalam setahun dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Didin Rasyidin Wahyu	v	-	100 %
2.	Bambang Dwi Suseno	V	-	100%
3.	Takro Jaka Rooseno	V	-	100 %

c. Rapat DPS

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-

Dewan Pengawas Syariah dalam setahun telah melakukan rapat intern sebanyak dua (2) kali. Selebihnya rapat yang diikuti adalah rapat Internal Perusahaan dengan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam pembahasan hal-hal tertentu seputar *issue* perusahaan. Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan pengurus perusahaan dalam setahun dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	H. Fajri Ali	V	-	100 %
2.	KH. Zaenal Abidin	V	-	100 %
Dst.				

Berikut rekap Rapat yang telah dilaksanakan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) tahun :

a. Rapat direksi dengan Karyawan

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Meeting Mingguan	23/01/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
2	Meeting Mingguan	30/01/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
3	Meeting Mingguan	06/02/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
4	Meeting Mingguan	13/02/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
5	Meeting Mingguan	20/02/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
6	Meeting Mingguan	06/03/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
7	Meeting Mingguan	13/03/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
8	Meeting Mingguan	20/03/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
9	Meeting Mingguan	27/03/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
10	Meeting Mingguan	03/04/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
11	Meeting Mingguan	10/04/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
12	Meeting Mingguan	17/04/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
13	Meeting Mingguan	02/05/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
14	Meeting Mingguan	08/05/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
15	Meeting Mingguan	15/05/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
16	Meeting Mingguan	22/05/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
17	Meeting Mingguan	29/05/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
18	Meeting Mingguan	05/06/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
19	Meeting Mingguan	19/06/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
20	Meeting Mingguan	03/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

21	Meeting Mingguan	10/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
22	Meeting Mingguan	17/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
23	Meeting Mingguan	24/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
24	Meeting Mingguan	31/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
25	Meeting Mingguan	07/08/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
26	Meeting Mingguan	21/08/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
27	Meeting Mingguan	28/08/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
28	Meeting Mingguan	04/09/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
29	Meeting Mingguan	18/09/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
30	Meeting Mingguan	02/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
31	Meeting Mingguan	09/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
32	Meeting Mingguan	16/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
33	Meeting Mingguan	23/10/2010	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
34	Meeting Mingguan	30/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
35	Meeting Mingguan	06/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
36	Meeting Mingguan	13/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
37	Meeting Mingguan	13/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
38	Meeting Mingguan	20/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
39	Meeting Mingguan	27/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
40	Meeting Mingguan	04/12/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
41	Meeting Mingguan	11/12/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
42	Meeting Mingguan	18/12/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

b. Rapat Direksi dengan Pengurus Perusahaan Lainnya (Dekom & DPS)

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Dirkom & DPS	02/02/2017	Pembahasan dengan KAP
2	Rapat Dirkom & DPS	06/02/2017	Entry Meeting OJK
3	Rapat Dirkom & DPS	07/02/2017	Exit Meeting KAP
4	Rapat Dirkom & DPS	08/02/2017	Pembahasan POJK
5	Rapat Dirkom & DPS	10/04/2017	Review Peraturan Perusahaan
6	Rapat Dirkom & DPS	23/08/2017	Pembahasan Rencana Pemeriksaan Inspektorat Ke PT. Jamkrida Banten
7	Rapat Dirkom & DPS	17/11/2017	Pembahasan Remunerasi dan lain-lain
8	Rapat Dirkom & DPS	08/12/2017	Pembahasan Laporan GCG

C. Rapat Dewan Komisaris

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Intern komisaris	03/02/2017	Review Temuan KAP
2	Rapat Intern komisaris	07/02/2017	Program Kerja Litbang
3	Rapat Intern komisaris	10/03/2017	Tindak Lanjut RUPS

4	Rapat Komdir	17/03/2017	Review SK Kompetensi, Review Peraturan Perusahaan & Komunikasi dengan pihak Eksternal
5	Rapat Komdir	05/05/2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
6	Rapat Intern Komisaris	07/07/2017	Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2017
7	Rapat Intern Komisaris	22/09/2017	Pembahasan Laporan Bulanan
8	Rapat Intern Komisaris	20/11/2017	Pembahasan Komite Remunerasi & Nominasi
9	Rapat Komdir	08/12/2017	Pembahasan Laporan GCG

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

Komite dibawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 komite , yaitu :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Komite Audit

Dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Komite audit diketuai oleh Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama) dengan anggota sebagai berikut :

- Bambang Dwi Suseno (Komisaris)
- Takro Jaka Rooseno (Komisaris)
- Enjum Jumhana (Satuan Pengawas Internal)

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit

- a. Mengawasi sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
- b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- c. Mediator antara Auditor Eksternal, Jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Dewan Komisaris guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya.
- d. Sebagai *quality assurance* dengan cara mengawasi kegiatan para auditor untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang rendah mutunya.
- e. Melakukan *monitoring* proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan di Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perusahaan dengan baik.

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite / fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Didin Rasyidin Wahyu		100 %
2.	Bambang Dwi Suseno		100 %
3.	Takro Jaka Rooseno		100 %
4.	Enjum Jumhana		100 %

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Komite Audit akan merealisasikan Program Kerja Komite Audit periode tahun 2017, yang melingkupi Penelaahan Atas Informasi Keuangan; Penelaahan Efektivitas Pengendalian Intern; Pelaporan Risiko Dan Pelaksanaan Manajemen Risiko; Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit; Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan; *self assessment* pelaksanaan tugas Komite Audit; dan penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris perihal saran perbaikan pengawasan dan pengendalian intern dan atau perihal penugasan khusus yang diantaranya Rapat Intern Komite Audit.

Menyampaikan Risalah Rapat Intern Komite Audit, menyampaikan laporan kegiatan Komite Audit; Penyampaian laporan tahunan tahun 2017 pelaksanaan kegiatan Komite; Penyusunan laporan Komite Audit; Penyusunan rencana kerja Komite Audit 2018; Review piagam Komite Audit; dan Partisipasi dalam seminar/*workshop/training* Audit dan perkembangan peraturan peraturan baru (anggota Komite).

b. Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Takro Jaka Rooseno
Anggota : Didin Rasyidin Wahyu, Bambang Dwi Suseno, Asep Wahyu Mulyana, Rasmin

Uraian Singkat Tentang Ketentuan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 februari 2017.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.

3. Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari pejabat eksekutif dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi.

c. Pemantau Risiko

Ketua : Bambang Dwi Suseno
 Anggota : Didin Rasyidin Wahyu, Takro Jaka Rooseno, Rachmat Rolly, Rosalinda

1. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip (Tata Kelola Yang Baik) *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko
2. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

4. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

- Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi :

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif secara menyeluruh.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi :

I. Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggotan Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS

II. Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja

- Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggungjawab :

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, manajemen risiko terintegrasi dan kebijakan lain terkait risiko yang disusun Direksi secara berkala, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Bank yang ditetapkan Direksi dalam bidang manajemen risiko.
- Melaksanakan tugas sesuai dengan program/rencana kerja Komite Pemantau Risiko.
- Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko
- Melakukan kajian terhadap fungsi dan efektivitas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan atas keputusan Direksi mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- Melakukan Monitoring dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit dalam jumlah tertentu yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko apabila diperlukan.
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

A. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahkan langsung fungsi kepatuhan dalam hal ini adalah Direktur Utama. Direktur utama membawahi Audit Internal perusahaan Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

-Uraian singkat-

- b. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

-Uraian singkat tugas satuan kerja fungsi kepatuhan dalam memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

-Uraian singkat terkait rasio likuiditas, gearing ratio, dan retabilitas, hasil penilaian secara mandiri (self assessment)-

- d. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan

menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a. Tujuan dan Ruang lingkup pekerjaan audit,

Tujuan dan Ruang Lingkup Auditor Internal. adalah "Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatandan tanggungjawabnya secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa."

Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu Perusahaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis, efektif dan efisien dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas kegiatan yang diperiksanya.

- b. Ruang lingkup audit internal adalah : sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap kegiatan operasional dan kontrol yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dan dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria kegiatan operasional yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan perusahaan telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu para divisi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.”

Bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka Satuan Pengawas Internal / auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (Ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas kegiatan akuntansi keuangan dan kegiatan operasional lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para divisi terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.”

Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten, aktivitas dari audit internal / monitoring yang disebutkan diatas digolongkan kedalam empat macam Aspek diantaranya:

1. Aspek Kelembagaan;
- b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal
2. Aspek Keuangan;
 3. Aspek Penyelenggaraan Usaha Bisnis dan Adminitrasi;

Ruang lingkup Satuan Pengawasan Internal tersebut haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya rencana kerja perusahaan.

-Uraian singkat :

Kedudukan satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

- c. Independensi auditor internal

-Uraian singkat :

Didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh manajemen kepada pengawas internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Pengawas internal harus

independen atau terpisah dari berbagai aktivitas yang diperiksa. Independensi memungkinkan pengawas internal untuk memberikan berbagai penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dicapai melalui status organisasional dan keobjektifan. Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten, Satuan Pengawas Intern merupakan bagian internal audit yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian kegiatan dibawah Direktur Utama.

Perusahaan perlu membangun dan mengembangkan fungsi audit internal yang independen dibekali dengan sumber daya yang memadai dan staf yang kompeten, pengendalian internal yang independen merupakan suplemen untuk memperkuat efektivitas pengendalian internalnya. Independent dalam hal ini adalah independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan BUMD yang terdiri dari independensi status perusahaan, kebebasan perencanaan pemeriksaan, kebebasan pelaksanaan pemeriksaan, dan kebebasan pelaporan hasil pemeriksaan sedangkan efektivitas pengendalian internal. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh satuan pengawas internal. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan perusahaan, SPI berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam perusahaan, namun juga kepada pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan tersebut.

Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun independen dalam penampilan (in appearance).

1. Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memelihara kebebasan sikap dan jujur.
2. Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yang di audit.

Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan auditee yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Uraian singkat

- a. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan.
- b. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan.
- d. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas perintah direksi.

- e. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan memberikan saran perbaikannya serta memantau tindak lanjut hasil temuan.
- f. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen di tiap divisi.
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit dengan auditor eksternal dan Komite Audit sesuai dengan standar audit dan kode etik masing-masing, sehingga tujuan audit semua pihak tercapai.

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Nama : Enjum Jumhana

Jabatan : Pengawas Madya Satuan Pengfawas Internal

Pendidikan : S2 Hukum Bisnis

Pengalaman Kerja : Bekerja di BRI dari Tahun 1988 – 2013

Pelatihan Yang Pernah diikuti :

1. Pelatihan Pengetahuan Produk Penjaminan Suraty Bond dan Bank Ganasi
2. Menyusun Perencanaan dan Pelaporan
3. Pelatihan Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
4. Managemen Resiko dan Managemen Stategi
5. Insan Kreatif
6. Perpajakan
7. Peningkatan mutu sumber daya manusia
8. Public Speaking, Public Relation dan service exellent
9. Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah
10. Pelatihan Audit Internal
11. Key Performance Indikator (KPI)

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal : 1 (satu) orang

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

-Uraian singkat contohnya: audit kantor cabang, audit kantor pusat,
dan audit teknologi sistem informasi.

Report Hasil Monitoring Internal

1. Divisi Akuntansi dan Investasi

No	Deskripsi Pekerjaan Saat Ini	Yang Seharusnya / Sesuai Dengan Aturan dan Ketentuan	Rekomendasi
1	<p>Job Description (uraian tugas) pada Unit Divisi AKSI yang ada antara lain:</p> <p>a. Kepala Divisi; b. Kepala Bagian Pemasaran Produk; c. Staff Akuntansi; d. Staff Keuangan dan Investasi; e. Staff Akuntansi divisi UUS.</p>	<p>Formasi Divisi AKSI yang seharusnya : Sesuai SK Direksi</p> <p>a. Kepala Divisi; b. Kepala Bagian Akuntansi c. Kepala Bagian Keuangan & Investasi d. Staff Akuntansi e. Staff Keuangan dan Investasi f. Staff Akuntansi UUS</p>	<p>Struktur Divisi AKSI agar disesuaikan dengan formasi saat ini.</p> <p>Kekurangan formasi :</p> <p>1. Kepala Bagian Akuntansi 2. Kepala Bagian Keuangan & Investasi</p> <p>Struktur Organisasi dan Job description pada Divisi Aksi agar disesuaikan dengan kondisi saat ini.</p>

2. Divisi SDM & Umum

No	Deskripsi Pekerjaan Saat Ini	Yang Seharusnya / Sesuai Dengan Aturan dan Ketentuan	Rekomendasi
1	<p>Pedoman Pengelolaan Email Perusahaan No.22/SDMU/POS/III/2017 01.Maret 2017</p>	<p>Pedoman Pengelolaan Email Perusahaan, Publikasi Informasi dan Manajemen pengamanan data serta sistim dokumen.</p>	<p>Dalam rangka Tata kelola Teknologi Informasi Perusahaan agar ditambahkan didalam Prosedur Operasional Standar.</p>

3. Divisi Teknik Penjaminan

No	Deskripsi Pekerjaan Saat Ini	Yang Seharusnya / Sesuai Dengan Aturan dan Ketentuan	Rekomendasi
1	Daftar Rincian/Laporan Outstanding: a. IJP yang ditangguhkan; Bulan Januari Rp. Bulan Pebruari Rp. Bulan Maret Rp. Bulan April Rp.	Bulan Januari 2017 Rp. 2.357.917.960,70 Bulan Pebruari 2017 Rp. 2.018.090.962,83 Bulan Maret 2017 Rp. 3.383.747.763,23 Bulan April 2017 Rp. 3.773.806.017,85	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme/tata cara perhitungan IJP tidak ada Saat ini Pengeleolaan ada di divisi AKSI untuk kedepan oleh divisi TP. Mengoptimalkan sistim

4. Divisi Unit Usaha Syariah

No	Deskripsi Pekerjaan Saat Ini	Yang Seharusnya / Sesuai Dengan Aturan dan Ketentuan	Rekomendasi
1	Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah (Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Arus Kas) Bulan: Arus Kas s/d Juni 2017 : Rp. 357.633.526,27 (Penerimaan Investasi Menurut Catatan UUS)	Laporan Keuangan (Neraca) pada Arus Kas s/d Juni 2017 untuk saldo Rek Penerimaan Hasil Investasi sebesar Rp.365.038.173,30	Mohon penjelasan Selisih sebesar Rp.7.404.607,03

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga

B. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi

Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2014	Noor Salim, Nursehan & Sinaraharja	Dra. Hj. Nursehan Muchlis.,Ak.,CA.CPA/ AP.0745	23.500.000,-
2015	Drs. Heroe, Pramono & Rekan	Choirul Anwar SE, MBA,MAFIS,Ak, CA, CPA/ AP.0160	26.600.000,-
2016	Shohibul Kaslani Komarianto & Santosa	Atok Komarianto, SE, AK, CPSAK, CA, CPA, CACP/ AP.1078	24.255.000,-

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

-Uraian singkat-

contohnya: memastikan bahwa Lembaga Penjamin menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik-

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Seluruh kebijakan dan prosedur perseroan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang diterbitkan atas pengesahan Direksi.

Dalam rangka penggunaan Sisitim Informasi berbasis Tehnologi dikembangkan Aplikasi yang disebut dengan “**Sistim Penjaminan Go Online (SIJAGO)**” yang mana Aplikasi tersebut terdiri dari ;

- **Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Konvensional (SIMAK)**
- **Sistim Informasi Penjaminan Konvensional (SIPAK)**
- **Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIBAJA)**
- **Sistim Informasi Karyawan On-Line (SIKARYO)**
- **Sistem Kafalah (SIKAF)**
- **Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Syariah (SIMAS)**

Dan seluruh Aplikasi tersebut sedang dalam pengembangan untuk terintegrasi.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

-Uraian singkat-

4. Struktur organisasi sistem informasi

-Uraian singkat mengenai struktur organisasi sistem informasi-

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

-Uraian singkat terkait ketersediaan pedoman penggunaan sistem informasi dan pedoman manajemen pengamanan data dan insiden-

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi,

Dewan Komisaris, dan DPS

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

-Uraian singkat-

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Gaji Pokok	V	V	V
Tunjangan Jabatan	V	V	V
Tunjangan Cuti	V	-	-
Tantiem	V	V	V
THR	V	V	V

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

-Uraian singkat-

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Mobil Inventaris	V	-	-
Tunjangan Perumahan	V	-	-
Tunjangan Telekomunikasi	V	-	-
Asuransi Kesehatan (<i>Rawat Inap</i>)	V	V	V
BPJS Kesehatan	V	V	V
BPJS Ketenagakerjaan	V	V	V

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Uraian singkat :

Tidak ada

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jumlah yang diterima dalam satu Tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	909.956.349	36.000.000
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	3	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	881.643.445	36.000.000
DPS	Jumlah DPS	2	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	172.948.764	18.000.000

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	2	3	2

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
10.818.766	3.131.717

2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
27.025.000	22.971.250

3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan

Tertinggi	Terendah
21.217.000	18.186.000

4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Direksi Tertinggi	Pegawai Terendah
27.025.000	10.818.766

5)

-Uraian singkat-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

- a. hasil rating yang telah dilakukan oleh lembaga rating/pemeringkat oleh PEFINDO pada bulan Agustus 2017, PT. Jamkrida Banten mendapatkan peringkat BBB-id;
- b. Perusahaan telah membuat brosur, *leaflet*, untuk memberikan informasi mengenai jasa penjaminan kepada terjamin atau calon terjamin, bahkan melalui koran/media massa dan website perusahaan.
- c. Tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada terjamin telah dibuat POS (Prosedur Operasional Standar) , sehingga ada standar yang sama dalam penyelesaian sengketa dimaksud;
- d. Kebijakan pembelian kembali saham, belum pernah diputuskan dalam RUPS.

Telah dilakukan pemeringkatan oleh Pefindo, Lembaga Pemeringkat yang terdaftar di OJK. Hasil rating -BBB memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai relatif terhadap perusahaan lainnya di Indonesia, namun lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan keadaan bisnis yang merugikan dibandingkan perusahaan lain dengan peringkat lebih tinggi. Dengan mendapatkan pemeringkatan -BBB, jamkrida banten sudah bisa bekerjasama dengan Bank Umum Nasional sesuai aturan Bank Indonesia. Dari beberapa perusahaan penjaminan yang ada di Indonesia, Jamkrida Banten menjadi salah satu dari 3 perusahaan yang telah memperoleh pemeringkatan dari lembaga rating

- Profile Jamkrida telah disajikan secara cukup informatif dalam website www.jamkridabanten.co.id termasuk didalamnya disediakan sarana untuk pengaduan dan penyelesaian sengketa.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja
2. Anggaran tahunan

-Uraian singkat-

Rencana jangka panjang dan Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Jamkrida Banten telah membuat rencana jangka panjang tahun 2017 sampai dengan 2022. Sedangkan rencana kerja dan anggaran tahunan dibuat setiap tahun. Rencana bisnis yang telah dibuat yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Tidak Ada	A		
		B		
		C		
		D		
2.		A		
		B		
		C		
		D		
Dst.		A		
		B		
		C		
		D		

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi		Tidak		Tidak	
		Lainnya					
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang saham		Tidak		Tidak	
		Direksi					
		lainnya					
		Dewan Komisaris					
2.		DPS					
		Pemegang Saham					
		Direksi					
		Lainnya					
Dst.		Dewan Komisaris					
		DPS					
		Pemegang Saham					
		Direksi					
		Lainnya					

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris Lainnya		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
2.		Direksi					
		Dewan Komisaris lainnya					
		DPS					
		Pemegang saham					
Dst.		Direksi					
		Dewan Komisaris lainnya					
		DPS					
		Pemegang saham					

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
		DPS lainnya		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
2.		Direksi					
		Dewan Komisaris					
		DPS lainnya					
		Pemegang Saham					
Dst.		Direksi					
		Dewan Komisaris					
		DPS lainnya					
		Pemegang Saham					

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

-Uraian singkat-

2. Transaksi material dengan pihak terkait

-Uraian singkat-

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.					
2.					
Dst.					

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

-Uraian singkat terkait benturan kepentingan-

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

-Uraian singkat-

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-Uraian singkat-

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat / Tanggal	Penyelenggara
1.	Certified In Risk Governance Professional	Jakarta, 08 Juni 2017	LSPMR
2.	Certified In Risk Governance Professional	Batam, 26-27 September 2017	LSPMR
3			

7. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.							
2.							
Dst.							

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan			
Dalam proses penyelesaian di internal			
Belum diupayakan penyelesaian			
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum			

9. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a. b.		
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata a. b.		
Total		

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

-Uraian singkat terkait nilai etika bisnis Lembaga Penjamin yang menjadi panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh Karyawan

Serang, Pebruari 2018

PT Penjaminan Kredit Daerah Banten

Menyetujui,

Direksi

Hendra Indra Rachman

Direktur Utama

Ahmad Rohendi

Direktur

Dewan Komisaris

Didin Rasyidin Wahyu

Komisaris Utama

Bambang Dwi Suseno

Komisaris

T. Jaka Roseno

Komisaris

Dewan Pengawas Syariah

H. Fajri Ali

KH. Zainal Abidin Sujai